

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dan sesuai dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*. Alasan nya, jika melihat dari isi pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep larangan terhadap *victim blaming* adalah, segala bentuk tindakan, perbuatan, dan perkataan yang dengan maksud untuk menyalahkan korban atau menyudutkan korban, baik disengaja maupun tidak, yang mengarah pada tidak adanya rasa empati pada korban, yang pada akhirnya mengakibatkan korban semakin terpuruk, merasa tertekan, dan tidak mau melaporkan apa yang dialaminya. Dengan pernyataan tersebut maka, segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan konsep larangan terhadap *victim blaming* tersebut harus benar benar diperhatikan. Dengan demikian maka perlindungan yang di hadirkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 66 sampai Pasal 70, sudah dan sesuai dengan konsep larangan terhadap *victim blaming*. Hanya saja implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya proses penyelesaian perkara dengan menghindari perbuatan yang mengarah pada *victim blaming*, pandangan dan stigma dalam masyarakat dalam menilai korban, pola pikir

aparatus penegak hukum dan masyarakat yang stereotip gender, serta terbatasnya layanan pendukung di daerah terpencil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah pentingnya pemahaman semua elemen aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengetahui apa itu fenomena *victim blaming*, sehingga semua korban yang mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual, tidak ragu ataupun takut untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya baik kepada aparat penegak hukum, maupun pengaduan kepada masyarakat sekitar. Terakhir, pentingnya penyediaan layanan pengaduan yang terpadu dan komplit disetiap daerah seluruh Indonesia.